

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah. Sistem desentralisasi pemerintahan tidak pernah surut dalam teori maupun praktik pemerintahan daerah dari waktu ke waktu.

Kabupaten pohnato adalah kabupaten yang berada di ujung barat provinsi Gorontalo yang saat ini program pembangunannya mengacu pada RPJMD Kabupaten Pohnato 2010-2015 disusun sebagai dokumen rencana strategis Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilu pada 5 Juli tahun 2010 dan kemudian dilantik tanggal 22 September 2010 sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Dokumen ini akan menjadi payung hukum dalam mekanisme dan proses penyusunan rencana pembangunan ke depan yang dituangkan dalam Rencana Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJMD Kabupaten Pohnato mengacu pada RPJMD Provinsi Gorontalo dan menggunakan RPJM Nasional sebagai pedoman utama.

Selain itu dalam upaya pemanfaatan ruang, maka implementasi sasaran dan program yang ada dalam RPJMD telah berpedoman pada RTRW Provinsi Gorontalo dan RTRWK Kabupaten Pohnato. Sedangkan secara horizontal program dan kegiatan yang termuat dalam

RPJMD Kabupaten Pohuwato akan diimplementasikan secara utuh, sehingga fungsi lain dari dokumen ini adalah sebagai media untuk mengukur atau menilai kinerja Pemerintah Daerah. Untuk tujuan ini, setiap tahun dan nantinya diakhir masa jabatan Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati akan mengevaluasi capaian pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan tahun ke-5 dari seluruh program yang tertuang di dalam RPJMD. Hasil evaluasi ini akan dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan atau laporan pertanggung-jawaban tahunan dan akhir masa jabatan.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis pembangunan daerah Kabupaten Pohuwato 2010 - 2015, maka disusun empat agenda pokok pembangunan daerah yakni :

1. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik yang diarahkan dalam peningkatan kualitas Pelayanan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan.
2. pengembangan sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan religius yang diwujudkan dalam pembangunan pendidikan yang berorientasi pada kemandirian yang didukung dengan kualitas kesehatan dan kualitas moral yang baik.
3. penyediaan infrastruktur strategis secara merata yang akan diwujudkan dalam Pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan public.
4. pengembangan ekonomi rakyat berbasis desa yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah dalam menunjang produktivitas yang bertumpu pada desa.

Reformasi birokrasi merupakan suatu proses upaya sistematis, terpadu dan komprehensif, di tujukan untuk merealisasikan tata kepemimpinan yang baik. Good governance and good local governance (tata pemerintahan yang baik dan tata pemerintahan daerah yang baik). Sistem yang

memungkinkan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Negara yang efektif dan efisien serta menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang di jalankan oleh pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Birokrasi adalah struktur organisasi digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya yang diangkat atau ditunjuk, garis dan tanggung jawab dan kewenangannya di atur dengan peraturan yang berlaku serta diketahui. Birokrasi pula yang dikenal sebagai masyarakat intelektual seharusnya menjadi contoh/panutan terhadap masyarakat, apalagi unsur pimpinan yang ada dalam suatu lembaga birokrasi itu sendiri, agar lebih berperan aktif menjadi contoh terhadap bawahannya agar benar-benar tercapai harapan dari reformasi birokrasi itu sendiri mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

System reformasi birokrasi di kabupaten pohuwato saat ini sudah mulai baik di bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, hal ini di buktikan dengan upaya pemerintah daerah saat ini, yang sudah beberapa kali mengepaluasinya dengan mendatangkan tim pakar dan ahli di bidang pemerintahan dan reformasi birokrasi, Bukan hanya itu saja upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan esensi reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik pemerintah daerah mempunyai inisiatif membuat peraturan Bupati Pohuwato nomor 45 tahun 2013 tentang kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pohuwato. Guna sebagai pembinaan dan pengawasan perilaku pegawai negeri sipil dalam menopang terwujudnya Good governance and good local governance (tata pemerintahan yang baik dan tata pemerintahan daerah yang baik).

Apa yang menjadi harapan dan tujuan reformasi birokrasi saat ini di kabupaten pohuwato masih kurang efektif Hal ini di buktikan masih adanya beberapa perilaku biromkrasi yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, Dari kedisiplinan, pelayanan, kinerja yang tidak

efektif, sampai persoalan yang melanggar ketentuan hukum yang dilakukan oleh oknum birokrasi itu sendiri. Sehingga hal ini mencederai suatu system yang ada pada birokrasi itu sendiri.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang ***“Perilaku Birokrasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana perilaku birokrasi pada Sekretariat daerah Kabupaten Pohuwato?
2. Apa saja faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku birokrasi pada Sekretariat daerah kabupaten Pohuwato?
3. Upaya apakah yang dilakukan agar perilaku birokrasi di Sekretariat daerah kabupaten Pohuwato akan baik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perilaku birokrasi pada Sekretariat daerah kabupaten Pohuwato
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku birokrasi pada Sekretariat daerah kabupaten Pohuwato kurang baik
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apakah yang dilakukan agar perilaku birokrasi di Sekretariat daerah kabupaten Pohuwato akan baik

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Memberikan suatu kontribusi kepada pemerintah daerah kabupaten pohuwato dalam mewujudkan perilaku birokrasi yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Memperluas pengetahuan tentang reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan profesional, yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.